



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 406 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 367 TAHUN 2023
TENTANG PENERIMA ANUGERAH PENGADAAN
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2023**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi internal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Instansi Penerima Anugerah Pengadaan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 367 Tahun 2023 tentang Penerima Anugerah Pengadaan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023;

- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 367 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMA ANUGERAH PENGADAAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 367 Tahun 2023 tentang Penerima Anugerah Pengadaan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

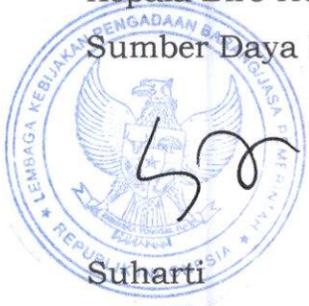
Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
367 TAHUN 2023 TENTANG PENERIMA
ANUGERAH PENGADAAN PADA RAPAT
KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2023

NOMOR : 406 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

DAFTAR PENERIMA ANUGERAH PENGADAAN
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2023

No.	Kategori Anugerah Pengadaan	Instansi Penerima berdasarkan Peringkat			
1.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Nilai Transaksi PDN Terbesar	<table border="1"><tbody><tr><td data-bbox="888 1465 1430 1804">1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Pertahanan 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia</td></tr><tr><td data-bbox="888 1804 1430 1998">1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Jawa Timur</td></tr><tr><td data-bbox="888 1998 1430 2190">1. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Kabupaten Kutai Timur 3. Kabupaten Berau</td></tr></tbody></table>	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Pertahanan 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Jawa Timur	1. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Kabupaten Kutai Timur 3. Kabupaten Berau
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Pertahanan 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia					
1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Jawa Timur					
1. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Kabupaten Kutai Timur 3. Kabupaten Berau					

No.	Kategori Anugerah Pengadaan	Instansi Penerima berdasarkan Peringkat
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Medan 2. Kota Surabaya 3. Kota Samarinda
2.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Persentase Nilai Transaksi PDN Terbesar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Intelijen Negara 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Sulawesi Selatan 3. Provinsi DI Yogyakarta <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pegunungan Bintang 2. Kabupaten Lanny Jaya 3. Kabupaten Mamberamo Tengah <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Tebing Tinggi 2. Kota Palembang 3. Kota Tasikmalaya
3.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Nilai Transaksi UMK terbesar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kementerian Pertahanan 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Kalimantan Timur 3. Provinsi Banten

No.	Kategori Anugerah Pengadaan	Instansi Penerima berdasarkan Peringkat
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Kabupaten Ogan Ilir 3. Kabupaten Kutai Barat
4.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Persentase Nilai Transaksi UMK terbesar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Samarinda 2. Kota Palembang 3. Kota Surabaya
5.	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Intelijen Negara 2. Badan Narkotika Nasional 3. Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Maluku 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Aceh
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Nias Barat 2. Kabupaten Halmahera Timur 3. Kabupaten Ogan Ilir
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Lubuk Linggau 2. Kota Banda Aceh 3. Kota Tebing Tinggi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Badan Pengawas Pemilihan Umum
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kepulauan Riau 3. Provinsi Bali

No.	Kategori Anugerah Pengadaan	Instansi Penerima berdasarkan Peringkat
		<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Klungkung2. Kabupaten Badung3. Kabupaten Minahasa Utara <hr/> <ol style="list-style-type: none">1. Kota Tangerang2. Kota Bima3. Kota Padang Panjang

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI